

**PENANGANAN UNJUK RASA YANG HUMANIS GUNA  
MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN ANARKIS**

***HANDLING HUMANLY DEMONSTRATION TO PREVENT  
ANARCHIST ACTION***

**M.T. Sitanggang**

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diaktualisasikan melalui beberapa bidang tugas seperti kegiatan pre-emptif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang semuanya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polri.

**Kata kunci:** *Unjuk rasa, humanis, anarkis*

**ABSTRACT**

*Community security and order is a dynamic situation and condition of society as a prerequisite for the implementation of a development process in the context of achieving national objectives characterized by security, order and the upholding of law and the realization of peace and ability to develop and develop community potential and strength in preventing, preventing and overcoming all a form of violation of law as well as other forms of disturbance that are disturbing the community. Maintenance of public security and order (Harkamtibmas) is one of the main tasks of the National Police as mandated in Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which was actualized through several fields of tasks such as pre-emptive, preventive and repressive activities (law enforcement) which were carried out continuously by the National Police.*

**Keywords:** *Protests, humanists, anarchists*

## Pendahuluan

Polri dalam pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa sering dihadapkan pada situasi yang susah dikendalikan sehingga sering berbenturan dengan pengunjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Dalam proses penanganan unjuk rasa tentunya seorang Kapolres harus dapat meyakinkan para pengunjuk rasa bahwa Polisi bukan untuk menghalang-halangi jalannya kegiatan unjuk rasa, tetapi justru untuk memfasilitasi dan mempertemukan antara perwakilan pengunjuk rasa dengan obyek yang menjadi sasaran pengunjuk rasa. Personil Dalmas harus dapat memposisikan pelaku unjuk rasa bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan melainkan sebagai kelompok orang atau warga masyarakat yang perlu diamankan dan dilindungi oleh sebab itu maka dalam pelaksanaan penanganannya harus mengedepankan teknik negosiasi, penggalangan kepada seluruh lapisan masyarakat pelaku unjuk rasa, serta menunjukkan sikap yang humanis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut

“ *Bagaimana mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis guna mencegah terjadinya tindakan anarkis dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat ?* “

Dari permasalahan yang dikemukakan, maka beberapa pokok persoalan yang akan dikemukakan pada tulisan ini adalah :

1. Bagaimana sumber daya manusia dalam optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis ?
2. Bagaimana dukungan anggaran dalam mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis ?
3. Bagaimana sarana dan prasarana yang mendukung dalam mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis ?

Bagaimana metode untuk mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis

### a. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode dengan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada terkait upaya optimalisasi optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis di Polres Bandung.

### b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam naskah ini adalah dengan pendekatan tugas, pendekatan yuridis, pendekatan empiris, serta pendekatan studi kepustakaan.

### a. Penanganan

Berasal dari kata dasar tangan, *penanganan* /pe-na-ngan-an/ n proses, cara, perbuatan menangan;<sup>1</sup>

### b. Unjuk rasa

Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia unjuk dapat diartikan pernyataan protes yg dilakukan secara massal; demonstrasi;<sup>2</sup>

### c. Humanis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia humanis diartikan orang yg

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/tangan> , diakses tanggal 11 Januari 2014, pukul 19.00

<sup>2</sup> [http://kbbi.web.id/unjuk\\_rasa](http://kbbi.web.id/unjuk_rasa) , diakses tanggal 11 Januari 2014, pukul 19.00

mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yg lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; pengabdian kepentingan sesama umat manusia; penganut paham yg menganggap manusia sbg objek terpenting; penganut humanism.<sup>3</sup>

#### **d. Mencegah**

Berasal dari kata dasar cegah yang berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegakkan; tidak menurutkan<sup>4</sup>

#### **e. Terjadinya**

Berasal dari kata dasar jadi yang sudah dijadikan (diadakan); sudah berlaku (tt suatu peristiwa):<sup>5</sup>

#### **f. Tindakan anarkis**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia tindakan anarkis diartikan orang yg melakukan tindakan anarki<sup>6</sup>

#### **g. Terwujudnya**

Berasal dari kata wujud yang berarti terlaksana; terbukti<sup>7</sup>

#### **e. Keamanan**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia **keamanan** /ke·a·man·an/ keadaan aman; ketenteraman: *polisi bertugas menjaga (memelihara) ~ dan ketertiban*<sup>8</sup>

### **Konsep polisi sipil**

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH (2002:55 ) polisi berwatak sipil dapat dikatakan dengan sederhana sebagai suatu cara perpolisian yang

menempatkan pada titik pusat perhatian. Artinya, cara-cara Polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Menjalankan perkajaan Polisi, seperti menjaga keamanan menangani kejahatan dan lain-lain adalah suatu hal, sedangkan bagaimana cara pekerjaan itu diselesaikan adalah hal yang lain lagi. Oleh karena itu dimensi moral dalam pekerjaan Polisi menjadi kental. Mensipilkan Polri merupakan pekerjaan besar, oleh karena itu memiliki dimensi banyak, seperti organisasi dan manajemen, pendidikan dan yang penting adalah perubahan perilaku. Yang perlu dikerjakan adalah :

- a. Mendekatkan kepada masyarakat
- b. Menjadikan akuntabel terhadap masyarakat
- c. Menggantikan mengandalkan pada “ penghancuran “ dengan melayani dan menolong.
- d. Peka dan melibatkan pada urusan sipil dan warga Negara seperti membantu orang lemah, tidak tahu dan kebingungan, frustrasi, pengangguran, sakit, lapar, kesepakatan dan putus asa.<sup>9</sup>

### **Konsep analisis SWOT**

Menurut Freddy Rangkuti dalam bukunya Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (2000:18-19), Analisa SWOT

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id/humanis> , diakses tanggal 11 Januari 2014, pukul 19.00

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/cegah> , diakses tanggal 11 Januari 2014, pukul 19.00

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/jadi> diakses tanggal 11 Januari 2014, pukul 19.00

<sup>6</sup> <http://kbbi.web.id/anarkis> , diakses tanggal 11 Januari 2014, pukul 19.00

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id/wujud> , diakses tanggal Januari 2014, pukul 19.00

<sup>8</sup> <http://kbbi.web.id/aman> , diakses tanggal 11 Januari 2014, pukul 19.00

<sup>9</sup> Prof.Dr.satjipto raharjo,sh, *Polisi sipil dalam perubahan social di Indonesia* (2006:54)

merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*). Hal ini berarti bahwa pada analisis SWOT harus dianalisis faktor-faktor strategis organisasi dalam kondisi yang ada saat ini.

- a. Kekuatan (*Strength*) adalah situasi internal organisasi berupa kompetensi/kapabilitas/ sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani peluang dan ancaman;
- b. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi dimana kompetensi/kapabilitas/sumberdaya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman;
- c. Peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan;
- d. Ancaman (*Threat*) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan.<sup>10</sup>

## Pembahasan

### 1) Sumber Daya Manusia dalam optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis

#### a. Kualitas

Anggota Polres Bandung secara umum dan anggota dalmas secara khusus pada pelaksanaan pengamanan unjuk rasa masih terjadinya benturan dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan pengamanan unjuk rasa

yang dilakukan oleh dalmas Polres Bandung antara lain :

- 1) Sikap yang tidak ramah dengan wajah sangar sambil melontarkan kata-kata tidak layak dan tidak sopan serta intimidasi kepada para pengunjuk rasa yang dilakukan oleh personel Dalmas yang dapat memancing emosi.
- 2) Adanya sikap arogan sehingga sering terjadinya pelemparan yang dilakukan oleh personel dalmas.
- 3) Agresif yang berlebihan sehingga sebagian personel Dalmas terpisah dari ikatan satuannya untuk melakukan pengejaran dan pemukulan kepada para pengunjuk rasa.

Dari hal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Personil dalmas belum sepenuhnya dapat memahami dan menerapkan perubahan paradigma Polri menjadi Polisi Sipil. Disamping hal tersebut personil polres belum pernah diikutkan dalam pelatihan-pelatihan dalmas yang dilakukan terpusat oleh Polri seperti pelatihan negosiator. Personil dalmas diawaki sebagian besar oleh Bintara Remaja yang memiliki emosional yang sangat labil sehingga sering terjadinya benturan antara pengunjuk rasa dengan personil dalmas.

### Kuantitas

Secara kuantitas jumlah kekuatan dalmas Polres Bandung sangat jauh dari DSPP. Dimana jumlah personil dalmas saat ini hanya berjumlah 30 personil dan pada DSPP 138. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa Polres Bandung menggunakan system cabutan dari polsek-polsek untuk memenuhi kekuatan 1 ssk.

<sup>10</sup>Freddy Rangkuti, *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (2000: 18-19)

Sehingga sangat-sangat jauh dari yang diharapkan.

### **Dukungan anggaran dalam optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis**

Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung kegiatan terhadap penanganan unjuk rasa. Dalam kenyataannya untuk mendukung kegiatan optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis tidak menggunakan anggaran yang tinggi, misalkan diambil contoh dengan mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan pelatihan atau sosialisasi berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial sehingga terciptanya mind set Polisi Sipil dari personil Polres Bandung pada umumnya dan personil dalmas pada khususnya.

### **Dukungan sarana dan prasarana dalam optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis**

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa, personil dalmas saat ini menggunakan peralatan yang usianya sudah lama dan tidak layak pakai. Sehingga dalam pelaksanaan tugas sangat membahayakan personil dalmas Polres Bandung. Hal ini akan berdampak pada tingkah laku personil dalmas pada saat melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa.

### **Metode dalam menerapkan optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis**

Proses pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang dilakukan di Polres Bandung saat ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa, belum memahami tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian,
- 2) Setiap adanya unjuk rasa selalu disikapi dengan kekuatan yang berlebihan, bahkan pasukan PHH Brimob langsung diturunkan di TKP, tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi para pengunjuk rasa.
- 3) Dalam proses pengamanan unjuk rasa tidak mengedepankan negosiasi tetapi langsung dihadapi dengan kekuatan personel Dalmas bahkan PHH Brimob pun langsung diturunkan.
- 4) Pada saat penangkapan terhadap pelaku atau provokator unjuk rasa selalu disertai kekerasan atau pemukulan.

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

### **Faktor internal**

#### **Kekuatan**

- 1) Adanya peraturan yang mengatur tentang penanganan unjuk rasa dan peraturan tentang tahapan penggunaan kekuatan sehingga dalam pelaksanaan tugas pengamanan personil Polres Bandung pada umumnya dan personil Dalmas pada khususnya memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tindakan-tindakan ataupun tahapan-tahapan terhadap masyarakat yang melakukan unjuk rasa.
- 2) Adanya fungsi Bimas di Polres Bandung, sehingga dalam pengamanan unjuk rasa dapat lebih mengedepankan fungsi tersebut

sehingga adanya komunikasi antara personil Polres Bandung dalam melaksanakan tugas dengan masyarakat yang melakukan unjuk rasa melalui negosiasi.

- 3) Bertambahnya jumlah Polwan di Polres Bandung, sehingga dapat lebih dikedepankan dalam menangani pengamanan unjuk rasa. Namun sesuai dengan tahapan-tahapan situasi (situasi hijau, situasi kuning dan situasi merah)

#### **Kelemahan**

- 1) Dari segi kualitas SDM, masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diadakan baik terpusat ataupun yang dilaksanakan oleh Polres Bandung berkaitan dengan penanganan unjuk rasa.
- 2) Dari segi kuantitas SDM, perbandingan antara jumlah DSPP dan riil personil Dalmas Polres Bandung sangat jauh.
- 3) Tidak ada anggaran khusus guna mendukung pelatihan dalam penanganan unjuk rasa yang humanis

#### **Eksternal**

##### **a) Peluang**

- 1) masih adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap Polres Bandung dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian
- 2) Apresiasi masyarakat terhadap paradigma baru Polri sebagai Polisi yang berwatak sipil.
- 3) Semakin meningkatnya kontrol social kepada seluruh personil Polres Bandung baik secara langsung atau tidak langsung dalam hal etika maupun perilaku.

#### **b. Ancaman**

- 1) Pendidikan masyarakat masih rendah sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pemerintah Daerah terkesan kurang serius dalam meningkatkan ekonomi penduduk, hal ini ditandai dengan masih banyaknya jumlah pengangguran
- 3) Terdapat media massa baik cetak maupun elektronik seringkali memberikan pemberitaan tidak berimbang mengenai Polri. Sehingga masyarakat menilai personil polri lebih pada pelanggaran yang dilakukan, bukan pada keberhasilan yang telah dicapai .

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH (2002:55 ) polisi berwatak sipil dapat dikatakan dengan sederhana sebagai suatu cara perpolisian yang menempatkan pada titik pusat perhatian. Artinya, cara-cara Polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Menjalankan perkajaan Polisi, seperti menjaga keamanan menangani kejahatan dan lain-lain adalah suatu hal, sedangkan bagaimana cara pekerjaan itu diselesaikan adalah hal yang lain lagi. Oleh karena itu dimensi moral dalam pekerjaan Polisi menjadi kental. Mensipilkan Polri merupakan pekerjaan besar, oleh karena itu memiliki dimensi banyak, seperti organisasi dan manajemen, pendidikan dan yang penting adalah perubahan perilaku. Yang perlu dikerjakan adalah :

- a. Mendekatkan kepada masyarakat
- b. Menjadikan akuntabel terhadap masyarakat

- c. Menggantikan mengandalkan pada “ penghancuran “ dengan melayani dan menolong.
- d. Peka dan melibatkan pada urusan sipil dan warga Negara seperti membatu *orang lemah, tidak tahu dan kebingungan, frustasi, pengangguran, sakit, lapar*, kesepakatan dan putus asa.<sup>11</sup>

### **Sumber Daya Manusia dalam optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis**

#### **Kualitas**

Dalam proses penanganan unjuk rasa tentunya seorang Kapolres harus dapat meyakinkan para pengunjung rasa bahwa Polisi bukan untuk menghalang-halangi jalannya kegiatan unjuk rasa, tetapi justru untuk memfasilitasi dan mempertemukan antara perwakilan pengunjung rasa dengan obyek yang menjadi sasaran pengunjung rasa. Selanjutnya personel Polres atau Dalmas harus dapat memposisikan pelaku unjuk rasa bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan melainkan sebagai kelompok orang atau warga masyarakat yang perlu diamankan dan dilindungi oleh sebab itu maka dalam pelaksanaan penanganannya harus mengedepankan teknik negosiasi serta penggalangan kepada seluruh lapisan masyarakat pelaku unjuk rasa. Kalaupun teknik negosiasi mengalami kegagalan atau tidak berhasil maka dalam proses penindakannya harus benar-benar prosedural, tidak aroganserta menjunjung tinggi HAM. Selain hal tersebut untuk mencapai penanganan unjuk rasa yang humanis seorang Kpolres hendaknya

dapat memberdayakan Polwan yang ada di Polres Bandung guna mendukung pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Polwa diposisikan pada baris paling depan tanpa menggunakan peralatan apapun dengan tujuan agar masyarakat menyadari bahwa Polisi dalam pelaksanaan pengamanan bukan merupakan musuh mereka melainkan sebagai mitramasyarakat. Dalam penempatan Polwan pada baris depan tentunya tetap memperhatikan tahapan kondisi masa.

#### **Kuantitas**

Melihat dari pengalaman, pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polres Bandung dimana dalam pengamanan unjuk rasa Polres Bandung menggunakan personil cabutan atau gabungan dari organik Polres dan Polsek-Polsek. Hal ini sangat mempengaruhi psikologis personil dilapangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah personil Dalmas Polres Bandung. Untuk mengatasi hal tersebut selain mengajukan permohonan penambahan personil kepada Kapolda, hendaknya Kapolres sebelum adanya pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, mengadakan penggalangan pada masyarakat yang akan melaksanakan unjuk rasa agar unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masyarakat dapat dilaksanakan secara tertib dan damai.

### **Dukungan anggaran dalam optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis**

Hendaknya dalam tahun anggaran berikutnya, Kapolres dapat

<sup>11</sup> Prof.Dr.satjipto raharjo,sh, *Polisi sipil dalam perubahan social di Indonesia* (2006:54)

mengalokasikan anggaran untuk pengoptimalan penanganan unjuk rasa yang humanis. Dimana saat ini masyarakat mengharapkan polri dapat bekerja secara profesional, dalam hal penegakan hukum Polri lebih dituntut pada tindakan pencegahan bukan pada tindakan represif dilapangan.

### **Dukungan sarana dan prasarana dalam optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis**

Dukungan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pengotimalan penanganan unjuk rasa yang humanis. Peralatan pengendalian masa merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Peralatan yang diharapkan lebih bersifat untuk memberikan efek kejut kepada para pengunjuk rasa, bukan peralatan untuk menghancurkan bahkan mematikan.

### **Metode**

Untuk dapat mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis dan menghindari bentrok antara personil Polres/ dalmas dengan masa pengunjuk rasa adalah dengan cara:

1). Memberikan APP secara rutin dan kontinyu dan setiap akan melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa berupa penekanan kepada seluruh anggota Dalmas dalam menghadapi dan menangani para pengunjuk rasa agar tetap sabar dan tidak mudah terpancing emosi. Dalam pelaksanaannya selalu diawasi oleh petugas provos, selain itu setiap personel diberikan kursus tentang latihan kesabaran serta program pembinaan rohani dan mental.

- 2) Memberikan APP tentang larangan-larangan untuk melakukan tindakan kekerasan dan pemukulan kepada para pengunjuk rasa atau tindakan yang tidak sesuai protap yang telah ditentukan, menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada anggota yang dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Selalu menekankan kepada anggota agar pada saat penanganan unjuk rasa seluruh anggota supaya tidak mengambil keputusan sendiri-sendiri dan harus tetap dalam ikatan satuan, memberikan pelatihan tentang pengamanan unjuk rasa serta mengadakan sosialisasi perkap tentang penanganan unjuk rasa.

**Visi** “ Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengoptimalan penanganan unjuk rasa yang humanis guna mencegah terjadinya tindakan anrkis”

### **Misi**

- 1) Menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kodusif di wilayah hukum Polres Bandung
- 2) Membangun personil Polres Bandung yang professional, humanis dan dicintai masyarakat dalam penanganan unjuk rasa.

### **2) Tujuan**

- 1) Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah hukum Polres Bandung
- 2) Terciptanya personil Polres Bandung yang proesional, hhumanis dan dicintai masyarakat dalam penangan unjuk rasa.

### **Sasaran**



- 1) Terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bandung
- 2) Terwujudnya personil Polres Bandung yang profesional, humanis dan dicintai masyarakat dalam penanganan unjuk rasa.

### **Kebijakan**

Sebagai suatu keputusan strategi dalam mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis guna mencegah terjadinya tindakan anarkis dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bandung.

### **Strategi**

Untuk mendapatkan susunan strategi Berkaitan dengan optimalisasi penanganan unjuk rasa yang humanis guna mencegah terjadinya tindakan anarkis dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bandung maka diperlukan sebuah analisis SWOT

Penanganan unjuk rasa yang humanis guna mencegah terjadinya tindakan anarkis dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, beberapa strategi yang dilakukan adalah :

#### **a. Jangka pendek (6 bulan)**

- 1) mengedepankan fungsi Bimas dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa
  - 1) mengedepankan Polwan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa sesuai dengan tahapan situasi.
  - 2) mengadakan pelatihan guna mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis
- #### **b. Jangka sedang (6 – 12 bulan)**
- 1) Menambah jumlah personil

- 2) Sosialisasi kepada masyarakat.

#### **c. Jangka panjang (1 – 2 tahun)**

- 3) mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

### **Action plan**

#### **a. Strategi jangka pendek (6 bulan)**

1. Mengedepankan fungsi Bimas dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa  
Kapolres memerintahkan Kasat Bimas untuk menyiapkan anggota Bimas sebagai tim negosiator dalam pengamanan unjuk rasa
2. mengedepankan Polwan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa sesuai dengan tahapan situasi.

Kapolres memerintahkan kepada Kabag Sumda untuk menyiapkan Polwan sebagai lapis pertama dalam pengamanan unjuk rasa sesuai dengan memperhatikan tahapan situasi.

3. mengadakan pelatihan guna mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis
  - a) kapolres memerintahkan kepada Kabag Sumda untuk merencanakan latihan kepada seluruh personil Polres guna mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis
  - b) kapolres memerintahkan kepada Kabag Sumda untuk membuat surat kepada Kapolda agar dapat diadakannya pelatihan tentang pengendalian diri.

#### **b. Strategi jangka menengah (6-12 bulan)**

1. Menambah jumlah personil  
Kapolres memerintahkan kepada Kabag Sumda untuk membuat surat kepada Kapolda guna pengajuan penambahan personil

## 2. Sosialisasi kepada masyarakat

Kapolres memerintahkan Kasat Bimas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kamtibmas

### c. Strategi jangka panjang (1-2 tahun )

1. Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat Kapolres bersama- sama dengan pemerintah daerah membuat suatu kerjasam di bidang keamanan.

### Kesimpulan

Sampai saat ini masih sering terjadinya bentrokan antara personel Dalmas dengan para pengunjuk rasa dikarenakan :

Kondisi SDM Polres Bandung dalam menangani unjuk rasa masih banyak yang berpikir bahwa masyarakat yang melakukan unjuk rasa merupakan musuh bagi mereka dan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa masih menggunakan personil gabungan atau cabutan dari Polsek- Polsek untuk memenuhi kebutuhan personil dilapangan.

Belum ada anggaran khusus guna mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis

Tidak tersedianya sarana prasarana yang menunjang guna mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis. pada pelaksanaannya masih menggunakan peralatan yang sudah lama yang kondisinya sudah tidak layak pakai.

Metode yang digunakan dalam mengoptimalkan penangan unjuk rasa yang humanis tidak sesuai dengan perkap ataupun SOP yang ada.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Polres Bandung dalam pengamanan unjuk rasa belum dapat

mengedepakan sikap yang humanis kepada masyarakat yang melaksanakan unjuk rasa.

### Rekomendasi

Merekomendasikan kepada kapolda guna meningkatkan kualitas SDM pada tingkat pembentukan agar lebih ditekankan pada perubahan kultur set dan mind set sehingga perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas dapat diterima oleh masyarakat.

Mengusulkan anggaran kepada kapolda guna pengoptimalan penanganan unjuk rasa yang humanis.

Mengajukan sarana prasarana pengamanan unjuk rasa kepada Kapolda guna menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.

Merekomendasikan kepada Kapolda untuk mengadakan pelatihan tentang pengendalian diri kepada seluruh personil Polda Jabar pada umumnya dan personil Polres Jabar pada khususnya.

Demikian Naskah Karya Perorangan ini disusun dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan, referensi, waktu dan pengalaman pasis, namun demikian merupakan usaha yang maksimal. Harapan pasis semoga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan langkah-langkah dan kebijakan bagi pimpinan dan rekan-rekan dalam upaya mengoptimalkan penanganan unjuk rasa yang humanis guna mencegah terjadinya tindakan anarkis.

### DAFTAR PUSTAKA

Raharjo Sutjipto, 2006 *Polisi sipil dalam perubahan social di Indonesia* jakarta:PT Kompas

Media Masa

Rangkuti, Fredyy, 2000 *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.*Jakarta: PT Gramedia  
Pusaka Utama

Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negar Republik Indonesia

Perkap no 1 tahun2009 Perkap tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Perkap no 16 tahun2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa